

**ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI PIUTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
(STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

Masri Ermawijaya
Prodi Akuntansi STIE Rahmadiyah Sekayu
E-mail: *masriermawijaya60@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur piutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dengan cara teknik analisis kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sehubungan prosedur piutang BPJS Kesehatan. teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pencatatan piutang BPJS kesehatan oleh bendahara RSUD Sekayu terjadi selisih hitung sebesar Rp. 38.650.000 hal ini disebabkan adanya perangkapan tugas dimana bendahara, kasir dan bagian pembukuan dikerjakan oleh 1 orang dan menunda pencatatan dokumen pasien peserta BPJS sehingga. laporan piutang yang disajikan tidak yang semestinya. Prosedur penerimaan piutang BPJS sudah berjalan cukup baik dimulai dari adanya surat penagihan pembayaran dari RSUD Sekayu kepada BPJS, bukti bayar BPJS kepada RSUD Sekayu dan Bukti Validasi dari Kantor Kas Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu Upaya yang dilakukan RSUD di masa yang akan datang adalah adanya pemisahan tugas dan personil dan memperbaiki prosedur pencatatan dan tetap meningkatkan prosedur penagihan kepada BPJS sehingga penerimaan piutang BPJS Kesehatan dapat diterima tepat waktu oleh RSUD Sekayu.

Kata Kunci: Prosedur, Piutang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh jaminan kesehatan serta hidup dalam kondisi sehat yang dijamin oleh pemerintah. Kesehatan adalah harta yang berharga bagi seorang

manusia dengan kesehatan seseorang mampu melanjutkan kehidupannya, memenuhi kebutuhannya Untuk menjamin kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan berupa pembentukan asuransi kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan kenyataan tersebut, berarti ada pergeseran pola pembiayaan masyarakat pengguna jasa rumah sakit, puskesmas, klinik dari masyarakat yang membiayai sendiri secara langsung menjadi pembiayaan oleh pihak ketiga. Karena ada fungsi pembiayaan secara tidak langsung yaitu melalui kartu asuransi kesehatan maka muncul piutang yang harus ditagih oleh rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pengobatan serta pelayanan kesehatan rumah sakit terhadap pasien.

Setiap pelayanan kesehatan akan selalu berkaitan erat dengan Prosedur yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Akuntansi yang bertujuan untuk menciptakan pengendalian intern dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Kesalahan atau terlupakan melaksanakan prosedur akan berakibat kurang akuratnya laporan yang dihasilkan dari sistem dan prosedur tersebut, Secara umum Piutang merupakan suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk/jasa tapi belum membayarnya dengan lunas (*accounts receivable*).

RSUD Sekayu merupakan lembaga pelayanan kesehatan sekaligus sebagai badan usaha pemerintah yang memberikan pelayanan ke

sehatan bagi masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya dan masyarakat umum lainnya. Sumber piutang pada RSUD Sekayu sebagian besar didapatkan dari piutang jasa layanan terutama layanan rawat inap dan rawat jalan, sebagian besar di dapatkan dari pasien BPJS Kesehatan. Pendapatan jasa layanan piutang RSUD Sekayu didapatkan dari :

- Klaim piutang BPJS Kesehatan.
- Klaim piutang perusahaan lainnya.
- Pelayanan MCU (*Medical Check Up*).

Berdasarkan hasil survei pendahuluan dan wawancara di peroleh informasi tentang terjadinya perangkapan tugas dimana sorang bendahara merangkap sebagai kasir dan sebagai petugas pembukuan sehingga sering terjadi penundaan pencatatan, dokumen hilang atau tercecer yang akhirnya lupa mencatat dan tidak termasuk dalam rekap laporan. Proporsi pendapatan piutang BPJS sangat besar pengaruhnya bagi operasional layanan rumah sakit, jika sering terjadi keterlambatan klaim dari BPJS Kesehatan akan menghambat jalannya layanan rumah sakit kepada masyarakat. Dan Fatalnya dikhawatirkan rumah sakit lebih mengutamakan pelayanan bagi pasien umum yang membayar secara langsung kepada rumah sakit dibandingkan pasien pertanggung JKN BPJS. Serta dikhawatirkan pula jika kemampuan likuiditas rumah sakit terus menurun dikarenakan keterlambatan pencairan piutang BPJS akan mengakibatkan pelayanan kepada pasien yang lambat dan tidak maksimal sehingga menyebabkan pasien tidak ditangani dengan baik dan meninggal. Untuk itu permasalahan prosedur piutang BPJS ini menjadi sangat penting bagi rumah sakit, sebgai sampel data, maka dapat disajikan pada tabel 1 Daftar Piutang Pelayanan pada salah satu klien yaitu perusahaan PT. Garda Medika (PT.Astra Buana) di bawah ini:

Tabel 1
RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Daftar Piutang Pelayanan
Tahun 2021

| No. | Periode Pelayanan | Jenis Jaminan | Jenis Pelayanan | Pembayaran Piutang | | Selisih Piutang |
|-----|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | | menurut RSUD | menurut BPJS | |
| 1 | 01/08/2020 | PT. GARDA MEDIKA (PT. ASTRA BUANA) | Rawat Inap | Rp 7.413.510.000 | Rp 7.452.160.000 | Rp 38.650.000 |

Sumber Dari : RSUD Sekayu (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1 Daftar koreksi piutang pelayanan Rawat Inap mngakibatkan selisih lebih bagi BPJS Kesehatan sebesar Rp.38.650.000,00, koreksi lebih harus dilakukan guna perbaikan. Atas dasar hal tersebut penting sekali diterapkannya prosedur yang jelas sehingga kesalahan yang terjadi sebagai akibat kelalaian dan kealpaan pegawai dan kurangnya pemeriksaan kembali terhadap berkas apakah berkas sudah lengkap semua atau bahkan belum sama sekali yang dapat

menyebabkan tidak berjalannya prosedur pencatatan piutang BPJS terhadap RSUD Sekayu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yaitu adanya selisih jumlah piutang menurut pihak rumah sakit dan pihak BPJS maka permasalahan ini dapat dirumuskan adalah Bagaimanakah prosedur akuntansi piutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai prosedur akuntansi piutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

II. LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah, dari serangkaian tahapan yang saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu cara atau metode dalam melaksanakan ataupun menjalankan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan akhir. Prosedur yang ada biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang dan prosedur juga bisa berlaku untuk kegiatan-kegiatan di waktu yang akan datang.

Secara umum **pengertian prosedur** Menurut Ida Nuraida (2008:35), adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya, sedangkan Zaki Baridwan (2017) menyatakan bahwa Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin keseragaman transaksi yang terjadi secara berulang.

Adapun **sifat-sifat dan ciri-ciri prosedur** menurut Moekijat (1989:194) sebagai berikut:

a. Sifat Prosedur

Prosedur terdapat dalam tiap bagian perusahaan; prosedur merupakan salah satu macam rencana yang penting. Prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan pekerjaan yang sifatnya berulang. Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna menjamin agar hasil akhir dicapai seperti yang diinginkan.

b. Ciri Prosedur

Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan-keinginan. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas. Prosedur harus mengikuti zaman (*up-to-date*).

Prosedur penagihan piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Penerimaan piutang mengirimkan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.
2. Bagian penagihan mengirimkan tagihan untuk melakukan penagihan kepada debitur.

Prinsip-prinsip prosedur menurut MC Maryati (2008:44) sebuah prosedur kerja sifatnya dapat mengurangi beban pengawasan karena penyelesaian pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan. Prosedur kerja prinsipnya adalah harus memperhatikan pada arus pekerjaan dan memperhatikan penggunaan alat-alat untuk menunjang terlaksananya suatu prosedur yang baik dan sesuai kebutuhan.

Prosedur menurut A.S. Moenir (1982:117) dibagi menjadi dua yaitu:

1. Prosedur umum, yaitu prosedur-prosedur yang menyangkut bidang pekerjaan yang bersifat umum (*general*) dan berlaku secara nasional yang menjadi tanggung jawab Manajer atas. Prosedur umum ini kadang-kadang demikian luas berlakunya sehingga melampaui batas-batas nasional.
2. Prosedur khusus (lokal), yaitu prosedur yang dibuat dan hanya berlaku secara lokal artinya untuk lingkungan tertentu, yang menjadi tanggung jawab manajer di tempat itu (atas, menengah atau bawah, tergantung luas lingkup prosedur itu).

Prosedur kerja selain disajikan secara tertulis bisa juga ditampilkan dalam bentuk bagan atau diagram. Menurut MC Maryati (2008:44), ada 3 bagan dalam prosedur, yaitu:

a. Bagan aliran kerja atau bagan proses (*Work-flow Chart*)

Bagan proses adalah bagan yang menunjukkan secara rinci langkah-langkah dalam suatu proses pekerjaan. Langkah-langkah ditunjukkan dalam bentuk simbol dan disusun secara vertikal.

b. Bagan gerak atau bagan layout kerja (*Work-layout Chart*)

Bagan layout menggambarkan gerakan pekerjaan dalam suatu ruangan. Bagan digambarkan pada sebuah *layout* kantor, sehingga gerakan diukur dalam hubungannya dengan faktor fisik (energi). Alur kegiatan atau pekerjaan digambarkan dengan garis yang menghubungkan dengan beberapa unit kerja yang harus dilalui.

c. Bagan arus

Bagan ini menggambarkan aliran atau arus kegiatan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Perjalanan dari dokumen-dokumen serta tembusannya dari suatu tempat bagian ke bagian lainnya sangat jelas digambarkan dalam bagan ini.

2.2 Pengertian Piutang

Menurut PSAK (2015;1.13) Aset Lancar mencakup aset (seperti piutang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset yang utamanya dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. piutang juga dapat diartikan sebagai klaim atau tagihan yang bisa diperoleh dari pihak lain, sedangkan menurut Kieso dkk (2011), piutang adalah klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.

2.3 Pengendalian Intern Terhadap Piutang

Pengendalian intern terhadap piutang dagang dan piutang lainnya merupakan tindakan pencegahan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian yang menyebabkan hilangnya asset perusahaan. Pengendalian piutang adalah proses

mencegah terjadinya kesalahan dalam mengendalikan saldo piutang yang dimiliki perusahaan.

Suatu sistem pengendalian internal yang handal untuk mencegah adanya kerugian piutang yang tak tertagih, hal ini juga mencegah adanya *fraud* yang kemungkinan terjadi dalam pelunasan piutang. Menurut Nuh dan Wiyoto (2011:284) pengendalian internal atas piutang usaha yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana pengamanan yang efisien dan efektif, baik perolehan fisik kas, pemisahan tugas termasuk masalah persetujuan kredit, sampai tersedianya data cattan akuntansi yang akurat

Pengendalian intern terhadap piutang dimulai dari penerimaan *order* penjualan, kemudian ke persetujuan atas *order*, persetujuan pemberian kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur, verifikasi faktur, pembukuan piutang, penagihan piutang, yang akhirnya akan mempengaruhi saldo kas atau bank

Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk piutang harus menghasilkan suatu kepastian bahwa semua transaksi piutang telah dibukukan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengendalian intern terhadap piutang dimulai dari penerimaan *order* penjualan terus ke persetujuan atas order, persetujuan pemberian kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur, verifikasi faktur, pembukuan piutang, penagihan piutang, yang akhirnya akan mempengaruhi saldo kas atau bank. Dalam hal ini harus diperhatikan pula retur penjualan secara periodik harus dibuat perincian piutang menurut golongan usianya untuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan dan menilai apakah bagian kredit dan bagian inkaso telah bekerja dengan efisien.

2.4 Tujuan Sistem Pengendalian Internal atas Piutang

Tujuan pengendalian internal atas piutang usaha adalah pengamanan yang efisien dan efektif dilakukan atas piutang, baik dari segi pengamanan yang akan dilakukan atas piutang, pengamanan atas perolehan fisik kas, pemisahan tugas, sampai pada tersediannya data catatan akuntansi yang akurat. Penerapan pengendalian internal memang tidak terlepas dari biaya-biaya tambahan yang harus dikorbankan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan pada dasarnya harus mempertimbangkan atau membandingkan antara besarnya biaya tambahan yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh.

2.5 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dalam Pasal 1 Ayat (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Tujuan BPJS dalam Pasal 3 adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Dan dalam Pasal (11) wewenang BPJS adalah : menagih pembayaran iuran, menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional, membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas Kesehatan, mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya, melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (RSUD), yang berlokasi di Jalan Kolonel Wahid Udin Lk. I Kayuara Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari s.d Juni 2022.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data menurut Sugiyono (2017:137) dilihat dari jenisnya adalah

sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dan data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh bukan langsung dari objek penelitian, tetapi dari faktor-faktor pendukung lainnya, seperti buku-buku referensi atau sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari data Laporan Penagihan Klaim BPJS Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu,

Menurut Moleong (2016:157), sumber data dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Kata-kata dan Tindakan

Adalah orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/auto tapes, pengambilan foto, atau film.

2. Sumber Tertulis

Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

3. Foto

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

4. Data Statistik

Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis, dimana data diperoleh dari sumber arsip RSUD Sekayu.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:173) yaitu sebagai berikut :

1. Studi Pustaka, menelaah teori-teori yang bersumber dari buku-buku teks, teori-teori dan literatur, jurnal dan sebagainya untuk mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan penelitian.
2. Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan acara mengadakan penelitian secara langsung langsung pada objek penelitian. Adapun cara yang dipakai dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Observasi (Pengamatan), yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung ke objek penelitian dalam mengumpulkan data-data sebagai penunjang penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan judul penelitian.
 - c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, sedangkan dokumentasi data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan catatan pada RSUD Sekayu.

3.4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:89), teknik analisis data menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Analisis Kualitatif

Suatu analisis yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi uraian kemudian dikaitkan dengan data yang lainnya untuk mendapatkan penjelasan

terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.

2. Teknik Analisis Kuantitatif

Suatu analisis pengesahan data yang dituangkan dalam bentuk angka untuk menentukan suatu penjelasan dari angka-angka atau memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk dan kalimat atau uraian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

IV. PEMBAHASAN

Prosedur piutang yang sedang berjalan di RSUD Sekayu yang dilakukan dengan cara :

- Penelitian yang meliputi investigasi awal, pengamatan pelaksanaan prosedur yang sedang berjalan dan survei lanjutan untuk memperoleh data dan kebutuhan informasi secara lengkap sebagai langkah awal untuk menyusun rencana analisa.
- Analisa yang meliputi : Analisa atas prosedur piutang yang sedang berjalan dan menentukan kelemahannya dan merekomendasikan usulan pemecahan masalah.

4.1. Analisis Prosedur Pencatatan Piutang Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

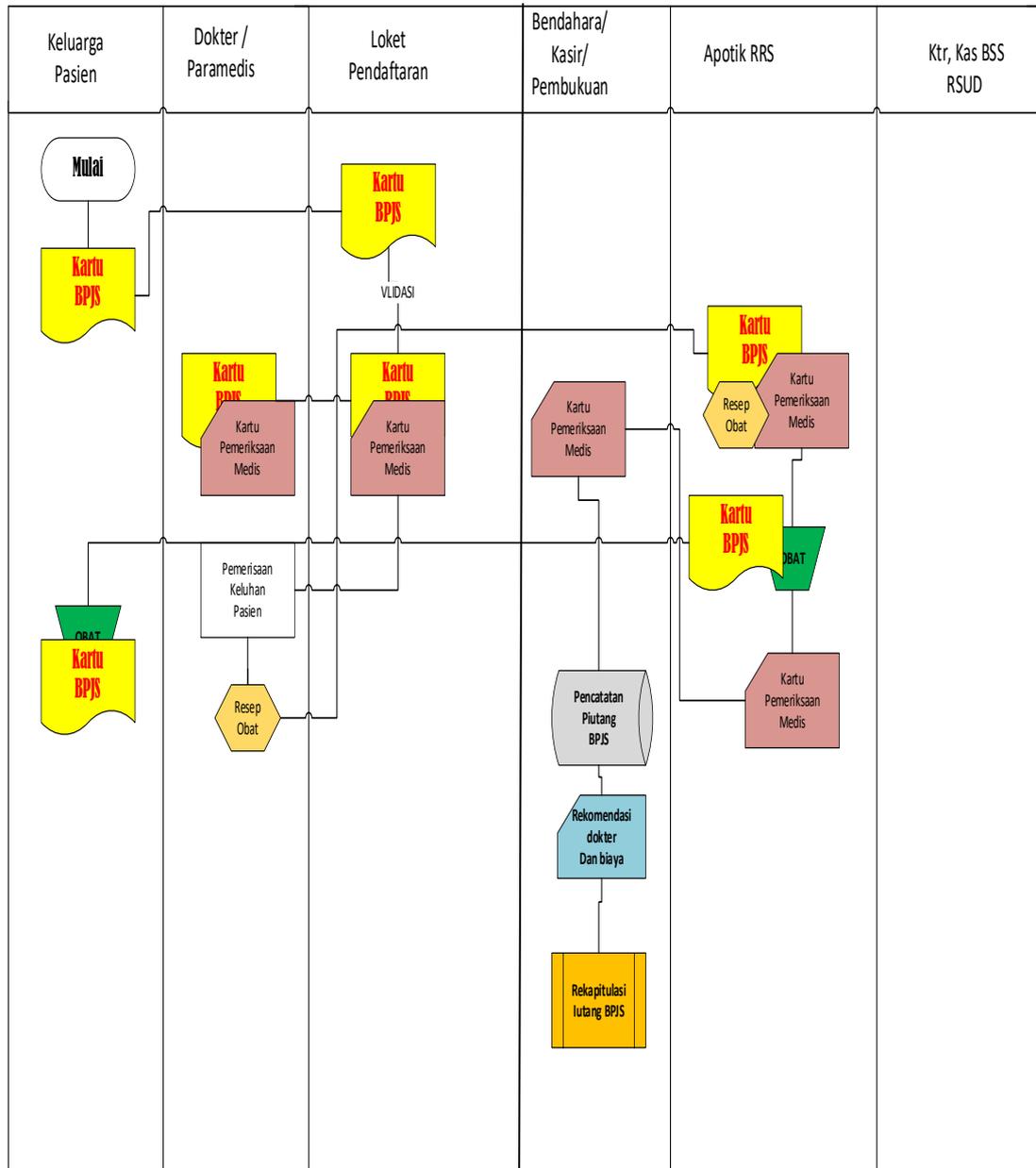
Piutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) timbul akibat adanya kesepakatan bersama antara BPJS sebagai pemberi jasa dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. BPJS sebagai pemberi jasa jaminan kesehatan akan menarik iuran

setiap bulan kepada masyarakat atau perusahaan sebagai peserta BPJS dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu akan melayani masyarakat peserta BPJS, baik peserta perorangan maupun peserta karyawan perusahaan, secara cuma-cuma dan membebankan biaya pengobatan masyarakat peserta BPJS kepada BPJS sebagai Piutang yang akan ditagih di awal bulan berikutnya. adapun bagian yang terlibat dalam transaksi timbulnya piutang ini adalah :

- Pasien dan keluarga pasien.
- Dokter dan perawat IGD RSUD Sekayu
- Loket pembayaran RSUD Sekayu
- Kasir RSUD Sekayu
- Apotek RSUD Sekayu
- Bank (dalam hal ini adalah Bank Sumsel Babel kantor Kas RSUD Sekayu.
- Pembukuan RSUD Sekayu

Secara teoritis, supaya tercipta pengendalian intern pencatatan piutang yang handal, masing-masing pihak yang terlibat hendaknya bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Namun dalam kenyataannya masih terdapat perangkapan tugas, dimana petugas yang ditunjuk sebagai bendahara juga merangkap sebagai kasir dan juga sebagai petugas pembukuan dan pengumpulan dokumen. Akibat perangkapan tugas ini terjadi penumpukan tugas pada satu orang, sehingga adanya dokumen hilang atau tercecer sehingga tidak tercatat dalam pembukuan Rumah Sakit. Dengan demikian laporan keuangan Rumah Sakit juga tidak akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya pula. Selain itu jumlah tagihan kepada BPJS tidak sesuai dengan jumlah kewajiban menurut perhitungan BPJS. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 diatas dari salah satu sampel dari pasien yang berasal dari pihak perusahaan terdapat selisih tagihan piutang RSUD Sekayu pada BPJS tahun 2021 sebesar Rp.7.413.510.000,- sedangkan menurut BPJS jumlah hutang perawatan yang harus dibayar pada RSUD Sekayu sebesar Rp.7.452.160.000,- Setelah diteliti, ternyata terdapat adanya dokumen tagihan yang tidak tercatat oleh bendahara yang merangkap Kasir dan Pembukuan sebesar Rp.38.650.000,-

Berikut ini dapat dijelaskan juga dalam Flowchart Gambar 1 Prosedur pencatatan piutang Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu:



Gambar 1

Flowchart Prosedur Pencatatan Piutang Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

4.2. Prosedur Penerimaan Piutang BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Prosedur penerimaan piutang digunakan sebagai pedoman bagi petugas dalam meningkatkan pengelolaan administrasi dan pengendalian penerimaan piutang, melakukan pembukuan dan pengakuan ke dalam perkiraan yang tepat, meningkatkan keamanan proses penyetoran penerimaan kas ke bank serta mencegah terjadinya penyimpangan pada proses penyetoran ke bank.

Prosedur penerimaan kas atas penagihan piutang kepada BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah prosedur BPJS membayar kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu dengan tujuan untuk menertibkan alur pasien yang membayar sehingga pelayanan terhadap pasien berjalan dengan lancar.

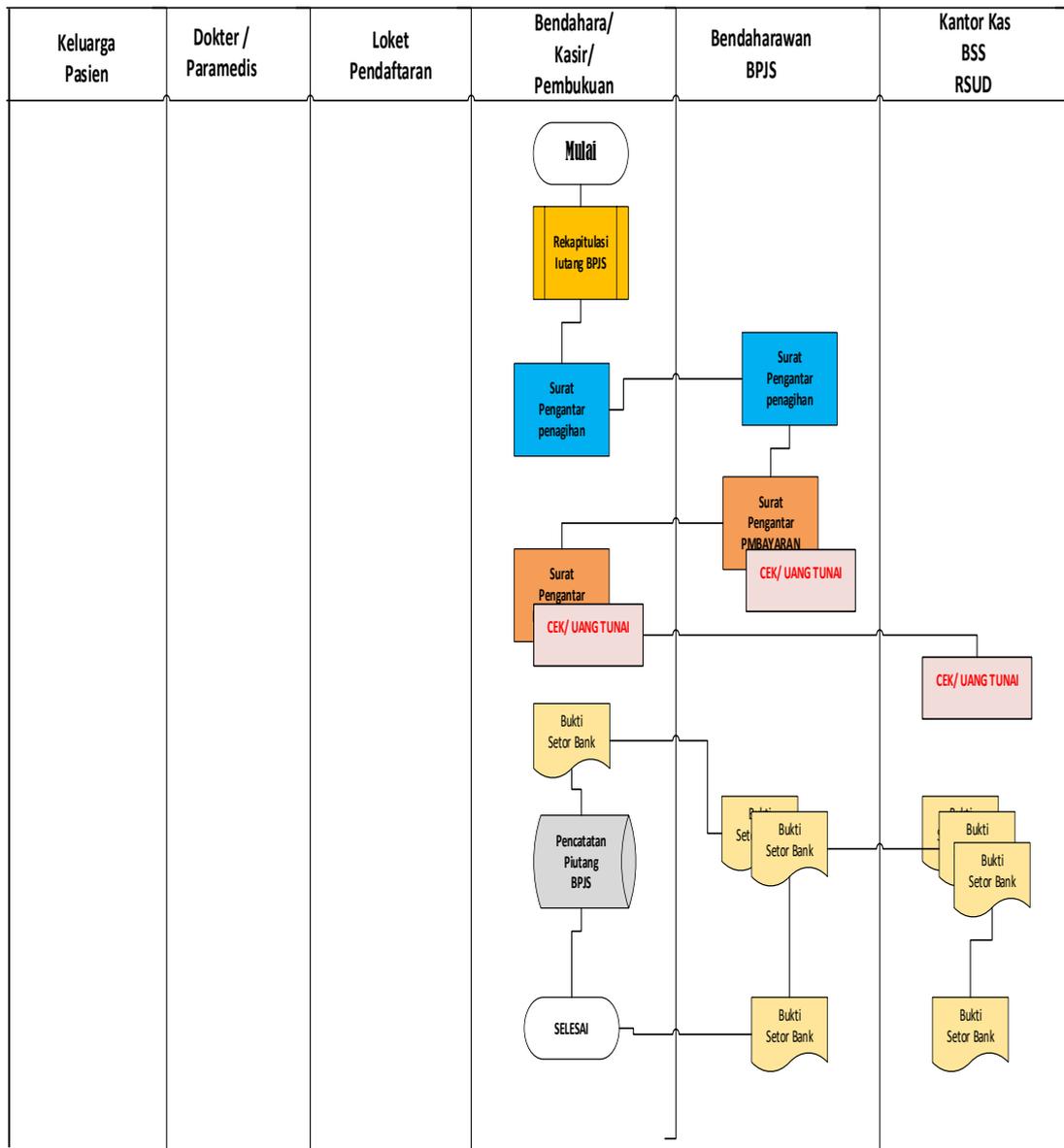
Tampak pada narasi prosedur penerimaan kas dan penagihan piutang kepada BPJS sebagai berikut :

1. Bagian-bagian yang terlibat pada Prosedur penerimaan kas dari penagihan piutang kepada BPJS ini adalah :
 - 1) Bendahara BPJS.
 - 2) Bendahara RSUD Sekayu
 - 3) Kasir.RSUD Sekayu
 - 4) Loker Bank Sumsel.
 - 5) Pembukuan RSUD Sekayu
2. Prosedur penerimaan uang atas pembayaran hutang BPJS cukup sederhana yaitu:
 - 1) Bagian Keuangan RSUD menyerahkan surat penagihan hutang kepada BPJS.
 - 2) Bendahara BPJS membawa Surat penagihan dari RSUD Sekayu dengan sejumlah uang yang tertera dalam surat penagihan tersebut.
 - 3) Bendahara sebagai bagian keuangan RSUD Sekayu membuat surat tanda penerimaan uang dari BPJS dan uang yang tertera dalam tanda terima tersebut langsung disetor ke Loker Bank Sumsel untuk mendapatkan bukti setor. Surat tanda penerimaan uang dan bukti setor Bank dimana lembar pertama (asli) dijadikan sebagai dasar pencatatan penerimaan uang dari pembayaran tagihan piutang BPJS. Bendahara merangkap sebagai kasir dan petugas pembukuan akan mencatat penerimaan uang dalam program khusus akuntansi RSUD. Catatan inilah yang merupakan dasar laporan hutang piutang antara RSUD Sekayu dengan BPJS.

Dalam proses penagihan utang kepada BPJS seringkali pihak BPJS terlambat dalam melunasi pembayaran kepada RSUD Sekayu, hal ini akan berdampak luas terhadap pelayanan esehatan baik medis maupun non medis pada

RSUD Sekayu. Permasalahan ini akan menyebabkan kadangkala pihak RSUD Sekayu dianggap kurang melayani atau merespon pasien peserta BPJS.

Setelah Narasi dijelaskan tentang prosedur penerimaan piutang BPJS pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Sekayu, maka prosedur ini dapat digambarkan menggunakan *flowchart* pada gambar 2 berikut ini :



Gambar 2

Flowchart Prosedur Penerimaan BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa prosedur yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan pada RSUD Sekayu telah menggambarkan pengendalian internal yang baik namun dalam prakteknya masih terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh petugas, yaitu :

1. Prosedur pencatatan RSUD Sekayu, dimulai dari pendataan pasien sebagai peserta BPJS, proses pengobatan atau pelayanan Kesehatan sampai rekap laporan yang berisi laporan jenis penyakit, obat yang diberikan dan tindakan yang harus dilakukan pasien. Berdasarkan Rekap. Lporan pasien inilah bagain pembukuan akan mencatat berapa biaya yang menjadi tanggungan BPJS. Namun dalam hal bagian keuangan terdapat perangkapan tugas dimana bendahara bertugas merangkap sebagai kasir sekaligus sebagai petugas pembukuan, hal ini terungkap karena seringkali penundaan pencatatan, bendahara mengerjakan tugas lainnya sehingga terkadang dokumen yang semestinya telah dicatat namun terlupakan atau ditunda dan kadang tercecer karena tergabung dengan dokumen pembukuan lainnya, sehingga laporan penerimaan piutang dari BPJS tidak sama atau terjadi selisih dan hal ini menyebabkan laporan dari RSUD Sekayu tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
2. Prosedur Penerimaan Piutang BPJS kepada RSUD Sekayu sudah baik dimana pihak RSUD menyerahkan surat penagihan piutang pasien sebagai peserta BPJS kepada pihak BPJS Kesehatan, selanjutnya berdasarkan surat tersebut pihak RSUD menerima pembayaran utang BPJS dibuktikan dengan bukti setor dari Bank Sumsel Babel, Namun kadangkala keterlambatan pembayaran utang dari BPJS Kesehatan menyebabkan citra RSUD kurang baik di mata pasien peserta BPJS.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi RSUD Sekayu, diharapkan :

1. Harus adanya pemisahan tugas antara bagian pembukuan atau pencatatan, bagian kasir dan bendahara sehingga dimasa yang akan datang tidak ada lagi

perangkapan tugas yang berdampak pada kesalahan pelaporan pembukuan dan terlambatnya laporan.

2. Pembayaran Utang BPJS kepada RSUD Sekayu sebaiknya dilunasi tepat waktu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak sehingga pelayanan pada RSUD Sekayu tidak terhambat dan lebih maksimal baik dari ketersediaan obat-obatan, peralatan (equipment), dokter dan pelayanan Kesehatan lainnya sehingga stigma kurang baik dari peserta BPJS kepada RSUD Sekayu dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Moenir 1982. *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi dan UMKM Berbasis Technopreneur*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan,
- Ida Nuraida 2008. *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D.2011. *Intermediate Accounting*. JakartaSalemba Empat.
- Kieso dkk 2014 *Pengendalian Intern dalam Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, .
- Moekijat 1989. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Secara Tunai Guna Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern pada PT. Dwi Mulyo Lestari Madiun*. Assets. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan,
- MC Maryati 2008 *Analisis Anteseden dan Dampak Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi*. Ekuitas. Jurnal Ekonomi dan Keuangan,
- M. Nuh dan Sutajar Wiyoto.2011. *Accounting Principles*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.
- PSAK No.14 Tahun 2015 Pada PT. Gatraco Indah Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan (R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
- Zaki Baridwan.2017. *Evaluasi Kinerja Tata Kelola TI Terhadap Penerapan Sistem Informasi Starclick Framework COBIT 5 (Studi Kasus: PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Semarang)*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi,